

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) KOTA BONTANG DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BONTANG

Azarian Muh. Faried Artyasa¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang dan untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang adalah dengan strategi-strategi untuk menangani masalah permukiman kumuh di Kota Bontang yaitu, mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan, bekerja sama dengan pihak terkait lembaga swadaya masyarakat dan swasta, program penataan permukiman kumuh, program ini menjalankan Kota tanpa kumuh di kampung selambai dengan anggaran dana di tahap satu sebesar 18 miliar dengan melakukan pembangunan di infrastruktur jalan sepanjang 400 meter, pembuatan jalan melingkar dan jalur evakuasi untuk keperluan emergency. Pada tahap dua dinas mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 30 miliar, anggaran ini dipergunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dilakukan perbaikan pelebaran kayu, dan bedah rumah dikampung selambai sebanyak 200 unit rumah. Selanjutnya faktor penghambat meningkatkan program kota tanpa kumuh Kota Bontang, yaitu: 1) pada tahap satu sebagian dana nya diprioritaskan untuk masuk ke infrastruktur jalan, 2) Penanganan kumuh hanya fokus pada infrastruktur, 3) Kultur, yang hanya mengandalkan wilayah pesisir sebagai mata pencarian.

Kata Kunci: Rencana Strategi (Renstra, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arzarienfariied@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Program Kotaku yang sudah berjalan saat ini di Kota Bontang yang melalui tahapan-tahapan pembangunan di Selambai, tahap pertama sudah di jalankan dan untuk saat ini akan di laksanakan tahap 2 dengan pengerjaan dari tahap 1 yang akan di lanjutkan ke tahap 2 dengan progres pengerjaan hingga tahun 2024, dalam SK Penentuan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Bontang Tahun 2020, lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah meliputi sejumlah 7 (tujuh) lokasi, di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total 73,56 Ha.

Dari berita yang penulis kutip dari [infosatu.co](https://www.infosatu.co) bahwa Walikota Bontang Ibu Neni Moerniaeni mengatakan program Kotaku tidak hanya permukiman kumuh yang ada pada program Kotaku tetapi program tersebut pun platform kolaborasi melalui peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Kegiatan Kotaku di Bontang yakni pembangunan IPAL, pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi, untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Program Kotaku, di Bontang membangun sanitasi menggunakan Ipal Komunal, selain itu juga pembangunan infastuktur untuk masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Menurut Ibu Neni Moerniaeni, cukup sulit dan harus sabar merubah kebiasaan buruk masyarakat, terlebih bagi masyarakat di pesisir yang masih menggunakan jamban. (<https://www.infosatu.co/wali-kota-bontang-buka-secara-resmi-workshop-kotaku-2019/>)

Berdasarkan kondisi dan masalah-masalah tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang.”

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Perencanaan

Dalam manajemen, perencanaan adalah “proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.” Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

“Perencanaan sebagai suatu profesi dan seperangkat praktek terdiri atas dua hal yaitu unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya.” (Rustiadi, 2009:336).

Teori perencanaan, lebih banyak memuat teori pengambilan keputusan, manajemen dan organisasi. Teori urban atau teori dalam perencanaan, terbentuk dari berbagai pendekatan multi disiplin, seperti arsitektur, geografi, transportasi, ekonomi dan sebagainya. Karena luasnya ruang lingkup perencanaan, maka perencanaan dilakukan berdasarkan berbagai kombinasi pendekatan. (Rustiadi, 2009: 342).

Strategi

Strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan (2005:37) bahwa “strategi pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya.”

Strategi menurut (Rangkuti, 2009:3), strategi yaitu “suatu alat untuk mencapai tujuan, tujuan utamanya adalah supaya perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.”

Menurut Wibisono (2006:50), “strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat.” Sedangkan, menurut Umar (2002:31), menegaskan bahwa strategi adalah “suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai.”

Manfaat perencanaan strategi, Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003:305) “Pentingnya perencanaan dalam konteks perencanaan jangka panjang dan taktis, namun secara substansi menggambarkan pentingnya perencanaan strategis. Dikemukakannya bahwa perencanaan ini penting karena : (1) Membuat anda tetap terfokus pada masa depan, selain juga pada masa kini; (2) Memperkuat prinsip-prinsip yang termuat didalam misi, visi, dan strategi; (3) Mendorong perencanaan dan komunikasi lintas fungsional; (4) Membangun jembatan untuk proses perencanaan taktis jangka pendek (tempat anda mengimplementasikan rencana jangka panjang); (5) Mendorong manajer untuk melihat perencanaan dari perspektif makro; (6) Menghemat waktu, mengurangi konflik, dan meningkatkan daya juang manusia; (7) Merupakan sarana untuk melaksanakan rencana dan memastikan pemahaman dan komitmen terhadap rencana itu; (8) Merupakan sumber informasi yang vital sebelum persiapan anggaran; (9) Dapat digunakan secara efektif oleh kontributor perseorang maupun oleh unit kerja, departemen, dan keseluruhan organisasi.”

Pengertian Meningkatkan

Pengertian meningkatkan secara epistemologi menurut Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer (2002:160) adalah “menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya kini telah diadakan di bidang pendidikan menteri kesehatan menentukan perlunya pengawasan terhadap usaha perdagangan eceran obat.”

Menurut Adi S, (2003:67) meningkatkan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan meningkatkan berarti kemajuan.

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Adapun lokasi penelitian, penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang. Jalan Moh. Roem No. 1, Bontang Lestari, Kota Bontang.

Mengenai fokus penelitian Penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang, meliputi :
 - a. Program penataan permukiman kumuh.
 - b. Pemantauan pelaksanaan kawasan permukiman kumuh.
2. Faktor penghambat Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP)

Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dalam meningkatkan program Kota Tanpa Kumuh

Programnya ini kan program (kotaku) kota tanpa kumuh, program ini memang program yang turun langsung dari pemerintah pusat, disini tugas kami untuk menindak lanjuti dengan beberapa instansi terkait baik itu kementerian dan balainya di samarinda dan sudah ada juga kerja sama kita dengan ditjen cipta karya, dan kementerian PU.

Uuntuk di Bontang Tahun ini kalau tidak salah itu ada Program Kotaku, istilahnya seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) tapi ini oleh Program pekerja Dinas PU namanya Cash for worth program padat karya tunai jadi memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai upah kerja tapi mereka bekerja di bidang infrastruktur, tetapi pemerintah pusat maupun daerah saat ini banyak yang memfokuskan untuk penanganan pandemic covid saat ini, intinya di Bontang untuk Cash for worth itu sendiri ada beberapa kelurahan jadi yang sasarannya itu adalah lokasi-lokasi kelurahan yang sudah pernah di bangunkan infrastruktur dari

program Kotaku, nah ini untuk pemeliharannya maupun perbaikan kerusakannya jadi bukan membangun baru tapi untuk memperbaiki atau untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur.

Untuk pertama-tama meminimalisir dulu, jadi ada beberapa daftar-daftar permukiman kumuh yang ada di wilayah kota bontang dan untuk tahun 2020 kemarin sudah ada berjalan di tahap 1, tahap 1 ini masuknya di wilayah selambai, pada tahun depan insyallah akan dilanjutkan ke tahap 2 dan masuk juga yang pantai harapan di berbas pantai yang sedang berjalan.

Kemudian untuk hal ini lancar atau enggak, ya lancar karena bisa di bilang program ini rutin dari tahun ke tahun, kan orang kita datang ke bontang terus juga kalau udah di Kota Bontang sendiri ada pendampingnya ya dari kementerian itu.

Jika dilihat dari undang-undang no.23 tahun 2014 kewenangannya dibagi jadi 3 ada kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah daerah itu berdasarkan luasannya jadi kalau luasnya suatu kawasan kumuh dibawah 10 hektar itu ditangani kewajiban kewenangan dari pemerintah daerah pemkot ya kalau lebih dari 10-15 hektar pemerintah provinsi diatas 15 kewenangan pemerintah pusat nah yang di selambai itu lebih dari 15 hektar makanya kita minta pusat untuk membantu menangani, dengan pemkot mengeluarkan dana APBD nah di luar dari dana itu juga kita bekerjasama dengan perusahaan yang biasa disebut itu bantuan CSR jadi bantuan ini untuk wilayah-wilayah over zone atau wilayah disekitar perusahaan jadikita meminta bantuan CSR untuk menangani masalah permukiman kumuh itu sendiri dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan CSR.

Program penataan Permukiman Kumuh

Program kotaku ini yang di selambai sudah berjalan baik sudah bagus, terlebih lagi dapat dukungan dari warga dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat cukup baik dan ya memang di awal pasti ada macam-macamnya bukan berarti penolakan yang di berikan hanya saja seperti kita bagaimana nanti jadinya kamu gak punya apa-apa? Nah tapi alhamdulillahnya kita bisa memberikan arahan dan sosialisasi yang baik dengan berkomunikasi melalui pendekatan sehingga program kegiatan di selambai bisa berjalan dengan baik terlebih lagi sudah selesai pada tahap 1.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai berapa besaran dana yang di keluarkan untuk Program Kotaku ini, beliau mengatakan bahwa:

“jadi dana yang di keluarkan itu mencapai Rp 18 miliar, dana ini dari pusat, lembaga swadaya, CSR, dan pemerintah kota, sebagian dana ini juga dari pengalihan dana untuk pembuatan Instalasi pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya saja pembangunan IPAL ini kami hentikan karena dana nya kami prioritaskan untuk infrastruktur jalan sepanjang 400 meter, pembuatan jalan melingkar dan jalur evakuasi untuk keperluan emergency.” (wawancara 4 Juni 2021)

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai pembangunan permukiman kumuh yang tepat di kota bontang, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya intinya itu sebenarnya adalah menata, tanpa ini mencabut masyarakat atau membuat masyarakat tercabut dari kultur dia selama ini dengan tetap memperhatikan akses-akses teknis tata bangunan, sanitasi, dan lain sebagainya karna memang yang kita hadapi selama ini kan program yang terkadang tidak berjalan lancar atau mulus karena biasanya mendapat penolakan tidak masuk dalam kultur mereka jadi sebenarnya kalau polanya sih penataan kawasan ini jelas ya ada standar-standar teknisnya dari PU ya gimana jarak antar bangunan, sanitasi seperti apa, sirkulasi udara itu semua juga sudah di atur.” (wawancara 4 april 2021)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

“secara teknis standar-standar tersebut sudah dari kementrian PU dari segi kesehatan, termasuk juga standar keamanan misalnya dari badan penanggulangan bencana, bagaimana jika terjadi bencana disitu juga akses untuk penanggulangannya bisa masuk misal penyediaan hidran, layanan pepadanya dari air juga, jadi memang harus terintegrasi ya karena tidak bisa hanya dari satu sisi, misalnya hanya ke PU saja ini kan tidak hanya ke satu sisi ini, tetapi juga harus memperhatikan integrasi dari aspek keamanan dari bencana, aspek kesehatan, dan social budturnya jadi itu sih menurut saya integrasi yang penting untuk di perhatikan.” (wawancara 4 april 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Wahyu selaku warga yang tinggal di permukiman kumuh, penulis menanyakan mengenai setuju kah bapak dengan pembangunan program Kotaku di daerah bapak tinggal, beliau mengatakan bahwa:

“awalnya saya tidak setuju karena saya sudah lama disini dan bangunan saya ini saya bangun sendiri dengan susah payah, awalnya saya menolak karena bagaimanapun rumah ini hasil usaha saya membangunnya dengan susah payah, senang susahnya saya ya dirumah ini, tetapi saat itu ada beberapa orang datang kemari dan mengupulkan warga untuk mebahas ini, lalu kami di arahkan dan dijelaskan kenapa harus digusur karna pemukiman kami sangat kumuh.”

Menurut bapak wahyu bahwa, penolakan yang dia lakukan adalah untuk memperjuangkan bangunan yang dia bangun dengan hasil usahanya, disini Dinas melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan arahan dan sosialisasi kemungkinan terburuh dari bangunan kumuh ini.

Pemantauan pelaksanaan kawasan permukiman kumuh

Berikut penulis mewawancarai Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, penulis menanyakan mengenai pelaksanaan pemantauan permukiman kumuh di Kota Bontang, beliau mengatakan bahwa:

“pemantauan yang kita lakukan sudah baik juga, terutama pemantauan sudah kita lakukan di setiap tahapan mulai dari perencanaannya, dan pelaksanaannya di tingkat akhir sejauh ini kita tidak menemukan adanya permasalahan berarti khususnya dari sisi masyarakatnya ya karena bagaimanapun mereka usernya di program kita sejauh ini tidak ada kita temukan kesalahan, kita dalam lembaga kegiatan ini memiliki tim monitoring yang bekerja dari sejak tahapan perencanaan sampai dengan tahapan akhir untuk serah terima kegiatannya dan kalau proses evaluasinya ini melihat sejauh mana dampak atau efek yang di hasilkan dari kegiatan ini.” (wawancara 4 april 2021)

Kemudian penulis menanyakan mengenai apa saja upaya pemerintah meningkatkan pembangunan untuk permukiman kumuh Kota Bontang, beliau mengatakan bahwa:

“seperti yang di selambai yang pertamakan arahnya dulu kita perbaiki infrastrukturnya dulu ya akses jalan, dan sebagainya nah kedepannya ini nanti kita lakukan pendekatan lebih banyak kita ke sanitasi dan penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti untuk kebakaran agar jika terjadi kebakaran akses untuk pemadam bisa masuk untuk kedepannya tapi yang pertama ini yang sudah kita tuntaskan penataan rumahnya dan jalan nanti itu nya tahap ke2 ini kita akan lebih banyak pendekatannya nanti ke sanitasi ke pengamanan dari kebakaran dan lain sebagainya.” (wawancara 4 april 2021)

Lebih lanjut penulis menanyakan mengenai pelaksanaan pada tahap 1 ke tahap 2, beliau mengatakan bahwa:

“kalau untuk menuju tahap 2 kita disini akan melanjutkan sisa dari pembangunan ditahap 1 untuk meneruskan program Kotaku ini di selambai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 30 Miliar, nah dari anggaran itu kami akan gunakan untuk kelanjutan proram Kotaku, anggaran ini nantinya kami fokuskan di perbaikan dan pelebaran kayu, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan juga kami mengusahakan untuk melakukan bedah rumah di kampung selambai sebanyak 200 unit, untuk yang lainnya dapat menyusul nantinya.” (Wawancara 4 Juni 2021)

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai target penyelesaian program Kotaku di Kota Bontang, beliau mengatakan bahwa:

“kalau kita sih target resminya sampai berakhirnya kapan kita kurang tau ya yang jelas program ini kita terus evaluasi dari tahun ke tahun kalau kita mengikuti target dari pemerintah itu kan tahun 2020-2024 itu target pemerintah pusat loh ya kotaku ini 2020-2024 karena dia targetnya sampai berapa ribu hektar satu Indonesia Bontang ini termasuk salah satu projectnya jadi kalau kotaku sendiri ya kita ikut pemerintah kalau secara

formilnya program Kotaku itu kita ikut pemerintah tentu karena programnya yang memiliki target 2020-2024.” (wawancara 4 april 2021)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

“tetapi kalau kebijakan penataan kawasan sendiri oleh pemerintah kota ya tetap berlanjut terus misalnya membangun itu istilahnya dalam jangka waktu 2020-2024 (4 tahun) itu rasanya tidak mungkin melakukan pembangunan yang ribuan hektar dalam waktu 4 tahun, tetapi kalau program kotaku sendiri sesuai dengan garisnya dari puast 2020-2024 tapi kita sendiri pemerintah kota tetap selalu melakukan kegaitan-kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan kawasan jadi kita akan memantau teruslah mana yang kurang kalo ini sudah perfect kita cari lagi lokasi di luar mungkin terlepas dari ditetapkan ini ya berapa lokasi nanti kita lihat nanti kita evaluasi terus.” (wawancara 4 april 2021)

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Bapak Iqbal selaku warga dilingkungan permukiman kumuh mengenai, apakah dari pihak dinas ada melakukan musyawarah atau negoisasi terkait program Kotaku ini, beliau mengatakan bahwa:

“ada waktu itu memang ada negoisasi sempat beberapa kali karna ada juga disini rumah warga yang belum memiliki ijin bangunan namun yang dilakukan sebutannya itu sosialisasi ya, jadi kami dikumpulkan di 1 tempat karena pembangunan ini kan menjadi perbincangan di masyarakat sini jadi ya kami sebagai warga harus tau apa yang akan selanjutnya mereka lakukan terhadap rumah kami.” (wawancara 4 april 2021)

Faktor penghambat Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang dalam Meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bontang.

Dari wawancara kendala yang di hadapi oleh Dinas Perumahan, “Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang yaitu merubah pola pikir masyarakat yang masih sempit dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kuat dengan sosialisasi melibatkan swadaya masyarakat yang bergerak aktif di lingkungan tersebut, penanganan kumuh yang masih parsial, kemudian belum mengubah bentuk permukiman, penanganan kumuh tidak fokus dilakukan disatu lokasi, dan penanganan kumuh hanya fokus pada infrastruktur padahal sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya ada di lingkungan pemukiman kumuh, susahnya mengambil kepercayaan pada masyarakat, karna pendidikan dan pengetahuan mereka kurang jadi di fikiran mereka hanya tau kalau kami mau menggusur padahal yang kami lakukan ini tidak semata-mata mau menggusur makanya sebelum melakukan pembangunan kami selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan perkembangan populasi juga menjadi penghambat kami karena mereka akan mencari tempat huni baru tetapi dengan bangunan yang tidak layak dan kumuh akan terus menerus mereka seperti itu.”

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang menjalankan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan bersangkutan langsung dengan masyarakat untuk menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan 2 program Renstra upaya meningkatkan Program Kota Tanpa Kumuh, yaitu:
 - a. Program penataan permukiman kumuh, program ini menjalankan Kota tanpa kumuh di kampung selambai dengan anggaran dana di tahap satu sebesar 18 miliar dengan melakukan pembangunan di infrastruktur jalan sepanjang 400 meter, pembuatan jalan melingkar dan jalur evakuasi untuk keperluan emergency, sebagian dana tersebut dari pengalihan dana untuk pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), kemudian jika anggaran dana tersedia maka tahap dua akan dijalankan pada tahun berikutnya dan meneruskan .
 - b. Pada tahap dua dinas mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 30 miliar, anggaran ini dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan pada tahap satu yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada tahap dua ini akan dilakukan perbaikan, pelebaran kayu, dan bedah rumah dikampung selambai sebanyak 200 unit rumah.
2. Berikut faktor penghambat meningkatkan program kota tanpa kumuh Kota Bontang, yaitu:
 - a. Pada tahap satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak terlaksana karena sebagian dana nya diprioritaskan untuk masuk ke infrastruktur jalan.
 - b. Penanganan kumuh hanya fokus pada infrastruktur, padahal sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya juga ada di lingkungan permukiman kumuh.
 - c. Kultur, yang hanya mengandalkan wilayah pesisir sebagai mata pencarian.

Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka sangat penting bagi penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Sebaiknya melakukan pembangunan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, mendahulukan apa yang di perlukan tidak hanya terfokus pada infrastrukturnya saja tetapi masih ada sosial, ekonomi, kesehatan,

pendidikan, dan budaya di lingkungan tersebut, sebaiknya juga melibatkan masyarakat setempat.

2. Sebaiknya Dinas juga melakukan musyawarah secara terbuka dengan masyarakat, rebug warga harus dikelola secara transparans dan terbuka bagi masyarakat. Penempelan papan proyek sebagai bentuk transparansi dan media informasi yang dapat diketahui semua warga terkait pelaksanaan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Adi, S. 2003. National Obesity Symposium II. Pusat Diabetes dan Nutrisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Soetomo Surabaya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002. *Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3*. Balai Pustaka, Gramedia.
- Rangkuti, 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruslan, 2005. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rustiadi, 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Umar, 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wibisono, 2006. *Manajemen Kinerja*. Erlangga, Jakarta.

Dokumen-dokumen:

- UU No 25 Tahun 2004 Tentang system perencanaan pembangunan nasional.
- UU Republik Indonesia No 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.